

1. Perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan.

1. Perkembangan Inflasi Provinsi Sulawesi Tenggara Triwulan I 2022

1.1 Perkembangan Inflasi Tahun ke Tahun (*Year on Year*)

Pada triwulan I 2022, inflasi IHK provinsi Sulawesi Tenggara tercatat mengalami peningkatan selaras dengan kenaikan harga pada kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar RT, kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga, serta kelompok transportasi. Peningkatan tekanan inflasi pada kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar RT didorong oleh ketetapan peningkatan harga LPG non subsidi ukuran 12kg. Selain itu, kenaikan tekanan inflasi pada triwulan I 2022 juga didorong oleh peningkatan tarif angkutan udara yang sebesar 18,41% (yoy) selaras dengan meningkatnya permintaan masyarakat. Faktor-faktor tersebut menyebabkan inflasi pada triwulan I 2022 tercatat sebesar 3,52% (yoy), meningkat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 2,59% (yoy) dan lebih tinggi dibandingkan inflasi Nasional dan Wilayah Sulampua yang masing-masing tercatat sebesar 2,64% (yoy) dan 2,58% (yoy).

Dari sisi proporsi, kelompok makanan, minuman, dan tembakau di Sulawesi Tenggara memiliki rata-rata proporsi tertinggi dalam perhitungan inflasi yaitu sebesar 31,74%, sedangkan kelompok transportasi memiliki pangsa sebesar 14,88%, dan kelompok perumahan, air, listrik, bahan bakar rumah tangga sebesar 13,80%. Berdasarkan kelompok tersebut, peningkatan tekanan inflasi di Sulawesi Tenggara pada Triwulan I 2022 didorong oleh peningkatan inflasi pada kelompok transportasi dan kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga namun tertahan oleh penurunan tekanan inflasi kelompok makanan, minuman dan tembakau.

Peningkatan inflasi pada kelompok transportasi dipicu oleh meningkatnya mobilitas masyarakat seiring berlangsungnya berbagai event Nasional maupun Regional di Sulawesi Tenggara. Sedangkan peningkatan inflasi pada kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah utamanya dipicu oleh kenaikan harga bahan bakar RT dan harga pasir. Peningkatan harga komoditas bahan bakar RT dipicu oleh kenaikan harga LPG 12kg sesuai dengan ketetapan PT. Pertamina. Sedangkan kenaikan harga pasir terjadi akibat terbatasnya pasokan ditengah permintaan yang tinggi untuk percepatan pembangunan proyek Pemerintah dan swasta.

◦ Kelompok Makanan, Minuman dan Tembakau

Pada triwulan I 2022, kelompok makanan, minuman dan tembakau memberikan andil terbesar terhadap inflasi IHK sebesar 1,42%. Meskipun demikian, secara tahunan kelompok makanan, minuman dan tembakau mengalami penurunan tekanan inflasi dari sebesar 4,92% (yoy) pada triwulan IV 2021 menjadi sebesar 4,55% (yoy) pada periode laporan. Penurunan tekanan inflasi tahunan tersebut terjadi terutama pada komoditas ikan segar dan sayuran. Penurunan tekanan inflasi ikan segar disebabkan peningkatan jumlah tangkapan ikan segar. Lebih lanjut, berdasarkan informasi dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tenggara pendaratan ikan tangkap pada 3 (tiga) pelabuhan utama di Sulawesi Tenggara (PPS Kendari, PPI Sodohoa, dan PPI Wameo) tercatat mengalami peningkatan dari triwulan sebelumnya dengan total produksi yang diperkirakan mencapai 7300 ton. Kenaikan produksi

tersebut menyebabkan beberapa komoditas ikan segar mengalami penurunan harga antara lain ikan selar sebesar -8,73% (yoy) dan ikan tuna sebesar -1,03% (yoy).

Selain itu, terjaganya pasokan beras seiring meningkatnya produktivitas padi pasca beroperasinya Bendungan Ladongi dan perbaikan jaringan irigasi menjadi faktor stabilnya harga beras dengan capaian inflasi sebesar -1,84% (yoy) dan menahan tekanan inflasi pada periode laporan dengan andil sebesar -0,09%. Meskipun demikian, kelangkaan minyak goreng yang terjadi di Sulawesi Tenggara dan berbagai daerah di Indonesia memicu kenaikan harga minyak goreng sebesar 35,14% (yoy). Kenaikan harga minyak goreng di Sulawesi Tenggara yang relatif lebih tinggi dibandingkan dengan daerah lainnya dikarenakan faktor keterbatasan pasokan ditengah permintaan masyarakat yang tinggi yang diikuti oleh fenomena *panic buying*.

- Kelompok Transportasi

Pada Triwulan I 2022, kelompok transportasi memberikan andil terbesar kedua terhadap inflasi IHK sebesar 0,75%. Andil yang cukup besar tersebut selaras dengan tekanan inflasi pada triwulan laporan yang tercatat sebesar 5,12% (yoy), lebih tinggi dibanding triwulan sebelumnya yang tercatat deflasi sebesar 3,32% (yoy). Peningkatan tekanan inflasi pada kelompok tersebut dipicu oleh kenaikan tarif angkutan udara yang tercatat sebesar 18,41% (yoy). Kenaikan tarif angkutan udara tersebut dipicu oleh meningkatnya mobilitas masyarakat yang didukung oleh kebijakan pelonggaran syarat penerbangan oleh Pemerintah. Hal tersebut terkonfirmasi dari rata-rata mobilitas harian masyarakat di area transportasi publik berdasarkan Google Mobility Index yang mengalami peningkatan sebesar 23,22%, meningkat dari periode yang sama tahun sebelumnya yang sebesar -9,02%.

Selain itu, kenaikan tarif angkutan udara tersebut juga dipicu oleh peningkatan harga bahan bakar pesawat (avtur) yang menyebabkan maskapai menyesuaikan tarif angkutan udara. Sebagai informasi, harga avtur di Bandara Halu Oleo, Sulawesi Tenggara pada 15- 31 Maret 2022 tercatat sebesar Rp15.166/liter, meningkat dari 2 (dua) minggu sebelumnya 1-14 Maret seharga Rp13.236/liter dan periode yang sama tahun sebelumnya yang seharga Rp8.603/liter. Kenaikan harga avtur di Sulawesi Tenggara pada periode laporan relatif lebih tinggi jika dibandingkan dengan bandara lain seperti Bandara Soekarno Hatta, Jakarta yang meningkat dari Rp11.967/liter menjadi Rp13.667/liter pada periode yang sama. Kenaikan harga avtur tersebut disebabkan oleh kenaikan harga minyak dunia karena terbatasnya pasokan akibat gejolak politik yang terjadi di Rusia-Ukraina.

- Kelompok Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga

Pada Triwulan I 2022, kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga memberikan andil terbesar ketiga terhadap inflasi IHK sebesar 0,54%. Andil yang cukup besar tersebut selaras dengan tekanan inflasi pada triwulan laporan yang tercatat sebesar 3,95% (yoy), meningkat dari triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 1,14% (yoy). Peningkatan tekanan inflasi pada kelompok tersebut dipicu oleh peningkatan inflasi bahan bakar rumah tangga sebesar 14,98% (yoy) dengan andil sebesar 0,33% terhadap inflasi Sulawesi Tenggara. Peningkatan tekanan inflasi bahan bakar rumah tangga dipicu oleh peningkatan harga LPG non-subsidi ukuran 12kg sebesar 12,90% (ytd) dari harga yang ditetapkan sebelumnya. Kenaikan harga LPG tersebut sejalan dengan penetapan PT. Pertamina untuk menyesuaikan harga LPG akibat kenaikan harga minyak bumi dan gas dunia.

Selain itu, pada periode laporan harga pasir dan semen juga tercatat mengalami kenaikan. Peningkatan harga kedua komoditas tersebut terjadi selaras dengan upaya percepatan konstruksi fisik beberapa proyek di Sulawesi Tenggara. Berdasarkan informasi dari kontak liaison Bank Indonesia Sulawesi Tenggara yang bergerak di sektor pengolahan nikel, saat ini perusahaan tengah melakukan ekspansi untuk meningkatkan kapasitas produksinya dan membutuhkan banyak bahan material seperti pasir untuk pembangunan line smelter baru. Selain itu, salah satu pengembang properti yang berada di Kota Kendari juga tengah melakukan ekspansi kawasan perumahan yang terlihat dari proses pembangunan fisik yang sedang berlangsung di kawasan tersebut.

1.2 Perkembangan Inflasi Bulanan (*Month to Month*)

Secara bulanan, pergerakan inflasi IHK Sulawesi Tenggara selama Triwulan I 2022 memiliki tren yang cenderung menurun jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Rata-rata inflasi bulanan pada periode laporan tercatat sebesar 0,21% (mtm), lebih rendah jika dibandingkan dengan rata-rata inflasi bulanan triwulan sebelumnya yang sebesar 0,53% (mtm). Berdasarkan sumbernya, rata-rata penyumbang terbesar inflasi bulanan terutama berasal dari kelompok kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga, serta kelompok transportasi. Di sisi lain, secara bulanan kelompok makanan, minuman, dan tembakau tercatat mengalami deflasi dan menjadi kelompok yang menahan tekanan inflasi bulanan sepanjang triwulan I 2022. Dilihat dari catatan inflasi bulanan, pada Januari 2022, Sulawesi Tenggara tercatat mengalami inflasi sebesar 0,48% (mtm), pada bulan Februari 2022 sebesar -0,03% (mtm), dan pada Maret 2022 sebesar 0,17% (mtm).

◦ Kelompok Makanan, Minuman dan Tembakau

Pada triwulan I 2022, kelompok makanan, minuman, dan tembakau mengalami rata-rata inflasi sebesar -0,09% (mtm) dengan rata-rata andil terhadap total inflasi sebesar -0,03%, meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang mengalami rata-rata inflasi sebesar -0,92% (mtm) dengan rata-rata andil sebesar -0,30%. Deflasi yang terjadi pada kelompok tersebut utamanya dipicu oleh meningkatnya produksi ikan segar seiring kondisi gelombang yang kondusif (Grafik 1.1). Lebih detail, berdasarkan jenis komoditasnya penurunan harga ikan segar secara umum terjadi pada komoditas ikan pelagis kecil yang menjadi favorit konsumsi masyarakat Sulawesi Tenggara seperti ikan kembung yang tercatat mengalami rata-rata deflasi sebesar 3,68% (mtm), ikan layang sebesar 2,99% (mtm) dan ikan selar sebesar 5,07% (mtm).

◦ Kelompok Transportasi

Pada Triwulan I 2022, kelompok transportasi mengalami rata-rata inflasi sebesar 0,14% (mtm) dengan rata-rata andil sebesar 0,02%. Capaian ini mengalami penurunan dibandingkan triwulan sebelumnya yang mengalami rata-rata inflasi sebesar 0,56% (mtm) dengan rata-rata andil sebesar 0,23%. Secara lebih detail, peningkatan inflasi terjadi pada pembelian mobil dengan rata-rata 1,19% (mtm). Kenaikan harga pembelian mobil tersebut terjadi karena meningkatnya permintaan pembelian mobil ditengah meningkatnya daya beli masyarakat. Selain itu, membaiknya daya beli masyarakat tersebut didukung dengan kebijakan Pemerintah dan otoritas moneter dalam mendorong pertumbuhan industri otomotif melalui kebijakan pelonggaran ketentuan uang muka kredit dan pelonggaran pajak kendaraan bermotor.

Kelompok Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga

Pada Triwulan I 2022, kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga mengalami rata-rata inflasi sebesar 0,89% (mtm) dengan rata-rata andil sebesar 0,12% meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang mengalami rata-rata inflasi sebesar 0,21% (mtm) dengan rata-rata andil sebesar 0,03%. Peningkatan tekanan inflasi pada kelompok tersebut dipicu oleh peningkatan harga bahan bakar RT dan material pembangunan seperti pasir dan semen. Pada periode laporan harga bahan bakar RT secara rata-rata mengalami inflasi sebesar 4,39% (mtm), pasir sebesar 2,70% (mtm), dan semen sebesar 2,03% (mtm).

Peningkatan harga bahan bakar rumah tangga terjadi karena adanya kenaikan harga minyak dan gas dunia yang menyebabkan Pertamina menyesuaikan tarif LPG. Sebagai informasi tambahan, harga LPG sejak bulan Desember 2021 hingga periode laporan telah mengalami penyesuaian sebanyak 2 (dua) kali dengan kenaikan harga sebesar 12,90% (ytd). Sedangkan peningkatan harga pasir dan semen terjadi karena meningkatnya permintaan kebutuhan material bangunan dari pelaku usaha konstruksi untuk mendukung percepatan pembangunan proyek swasta maupun Pemerintah.

2. Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah.

1. Ketersediaan Pasokan

a. Basis data produksi dan konsumsi yang masih belum konsisten dalam penyampaian setiap minggunya. Dengan langkah pengendalian Membangun komitmen penyampaian basis data melalui media Whatsapp secara mingguan dan secara rutin membangun diskusi terkait isu inflasi sebagai bentuk koordinasi awal dalam menentukan kebijakan pengendalian inflasi yang akan dilakukan.

b. Pengolahan beras lokal yang masih belum maksimal sehingga sebagian besar gabah dari Sultra dikirim ke Makassar dan diimpor dalam bentuk beras premium. Dengan bentuk pengendalian TPID Kab. Kolaka bersama Bulog pada 13 Januari 2022 membangun komitmen dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama (PKS) pengadaan dan penyaluran beras premium untuk ASN Pemda Kolaka. Kerjasama ini diharapkan akan mempercepat penyerapan beras produksi lokal sehingga dapat menjaga stabilitas harga beras baik ditingkat produsen ataupun konsumen serta mengurangi jumlah impor beras.

FileEditViewInsertFormatTable

c. Kondisi pasokan yang terbatas di wilayah/pasar tertentu yang memicu kenaikan harga. Dengan bentuk pengendalian Melakukan pemantauan arus barang dan jasa melalui Disperindag, Balai Karantina Pertanian, dan Dinas Ketahanan. Kemudian Menggelar sidak pangan untuk memastikan kecukupan pasokan :

- TPID Kab. Muna pada tanggal 18 Januari 2021 menggelar sidak pangan untuk memantau kondisi harga dan pasokan di Pasar Sentral Raha pasca perayaan

- TPID Provinsi Sultra pada 2 Februari 2022 melakukan sidak pasar untuk memantau ketersediaan pasokan minyak goreng dan memastikan pedagang menerapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan oleh pemerintah. Dari kegiatan pemantauan secara langsung

tersebut, harga minyak goreng pada periode laporan terpantau mengalami penurunan sebesar -0,70% (mtm) dibandingkan bulan sebelumnya.

2. Kelancaran Distribusi

a. Masih terdapat jalur transportasi darat yang rusak sehingga menghambat logistik pangan antar daerah di Sultra. Dengan TPID Provinsi Sulawesi Tenggara berkoordinasi bersama Pemda dan dinas terkait untuk memperbaiki kondisi jalan yang Bappeda juga telah mencanangkan perbaikan jalan Konawe-Kendari yang merupakan salah satu jalan strategis sebagai jalur distribusi bahan pangan antara Kota Kendari dengan daerah lainnya di Sultra.

b. Belum tersedianya kandang komunal sapi di daerah pelabuhan sehingga menghambat distribusi sapi dari Kabupaten/Kota sentra (Kab. Muna dan Konawe Selatan) ke daerah lain seperti Kota Kendari dan Baubau TPID Kab. Muna dan Konawe Selatan berkoordinasi dengan Pemda terkait untuk memfasilitasi pembangunan kandang komunal sapi untuk memudahkan logistik sapi melalui jalur laut.

3. Keterjangkaun Harga

a. Disparitas harga antar daerah masih terjadi, terutama komoditas pangan seperti aneka cabai, telur ayam ras, daging sapi, dan minyak goreng. Dengan Tindak lanjut Melaksanakan sidak pangan dan operasi pangan murah:

- TPID Provinsi Sultra pada 2 Februari 2022 melakukan sidak pasar untuk memantau ketersediaan pasokan minyak goreng dan memastikan pedagang menerapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan oleh pemerintah. Dari kegiatan pemantauan secara langsung tersebut, harga minyak goreng pada periode laporan terpantau mengalami penurunan sebesar -0,70% (mtm) dibandingkan bulan
- TPID Bombana pada 16 Februari 2022 melaksanakan sinergi pengendalian inflasi ditengah kelangkaan minyak goreng yang dipimpin oleh Sekda. Hasil dari rapat tersebut adalah Disperindag diminta untuk berkoordinasi dengan Bulog untuk mengadakan pasar murah dalam rangka stabilisasi harga minyak goreng.
- TPID Kota Baubau pada 14 Maret 2022 melaksanakan rapat koordinasi yang dipimpin oleh Walikota Baubau dalam rangka penguatan sinergi pengendalian inflasi menjelang Ramadhan dan Idul Fitri. Hasil dari rapat tersebut TPID Baubau merencanakan untuk melaksanakan sidak pasar dalam mengantisipasi potensi kenaikan harga menjelang HBKN.

4. Komunikasi

a. Panic Buying yang terjadi oleh masyarakat akibat terbatasnya pasokan dan ekspektasi terhadap potensi kenaikan harga kedepan, dengan langkah pengendalian sebagai berikut :

- TPID Sultra melaksanakan komunikasi efektif melalui kegiatan sosialisasi belanja bijak dan bincang bareng media untuk mengelola ekspektasi masyarakat tetap positif terhadap kondisi inflasi
- Selain itu, TPID Sultra juga berkoordinasi bersama satgas pangan untuk memastikan kondisi pasokan tetap terpenuhi dan meminta komitmen distributor untuk menambah kuota minyak goreng menjelang periode HBKN.

b. Peningkatan kualitas dan kuantitas koordinasi antar OPD dalam pengendalian inflasi, dengan langkah pengendalian sebagai berikut :

- TPID Sultra meningkatkan efektifitas koordinasi antar OPD melalui pelaksanaan pertemuan baik secara formal maupun informal secara rutin sebagai upaya meningkatkan sinergi dalam pengendalian

3. Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

PELAKSANAAN KEBIJAKAN PENGENDALIAN INFLASI DI DAERAH

1. Pelaksanaan Kerja Sama Antar Daerah

- KAD komoditas daging sapi antara Kabupaten Muna dan Kota
- KAD komoditas ikan segar antara Kota Kendari dan Kota
- KAD komoditas daging sapi antara Kota Kendari dan Kabupaten Konawe
- KAD komoditas cabai rawit antara Kota Kendari dan Kabupaten Konawe
- KAD komoditas sayuran antara Kota Kendari dan Kabupaten Konawe Selatan.

TPID bersama pelaku usaha terkait terus bersinergi erat untuk merealisasikan dan memantau pelaksanaan KAD secara kontinu. TPID Provinsi Sulawesi Tenggara bersama TPID Kota Kendari juga membantuk skretariat bersama dan tim teknis yang bertujuan sebagai pelaksana pelaporan realisasi KAD dan update informasi terkait isu, serta kendala yang terjadi di lapangan.

2. Kegiatan Pasar Murah

- Kegiatan Pasar Murah dalam Menyambut Perayaan Nataru oleh TPID Kab. Bombana bersama Dinas ketahanan Pangan Provinsi Sultra pada tanggal 28-29 Desember 2021
- Kegiatan Pasar Murah dalam Rangka Stabilisasi Minyak Goreng oleh TPID Prov. Sultra bersama BULOG pada tanggal 3-5 Maret 2022
- Kegiatan Sidak Pasar dalam Upaya Menjaga Kestabilan Harga Komoditas Minyak Goreng pada 2 Februari 2022

3. High Level Meeting TPID

- High Level Meeting (HLM) TPID 15 Desember 2021 Yang Dipimpin Oleh Bupati Kabupaten Muna
- High Level Meeting (HLM) TPID Kota Kendari dalam Rangka Mendorong KAD dan Pengendalian Inflasi Menjelang Periode HBKN
- High Level Meeting (HLM) TPID 16 Februari 2022 Yang Dipimpin Oleh Sekda Kabupaten Muna
- Rapat Koordinasi Penguatan Sinergi dan Pemetaan Program TPID Tahun 2022
- Kegiatan Sidak Pasar untuk Memastikan Ketersediaan Pasokan dan Keterjangkauan Harga Menjaga HKBN Ramadhan oleh TPID Kab.Muna
- Kegiatan Pemantauan Harga dan Ketersediaan Pasokan Pasca Nataru oleh TPID Kab. Muna pada tanggal 18 Januari 2022
- Penandatanganan Perjanjian Kerjasama Pengadaan dan Penyaluran Beras Premium Untuk ASN Pemda Kab. Kolaka pada 13 Januari 2022

4. Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

EVALUASI PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA TERHADAP KEBIJAKAN PENGENDALIAN INFLASI DAERAH

Capaian inflasi IHK Sultra pada tahun 2022 diperkirakan lebih tinggi dibandingkan inflasi Nasional dan capaian inflasi pada tahun 2021, namun masih berada pada sasaran inflasi Nasional $3 \pm 1\%$. Peningkatan tekanan inflasi pada tahun 2022 salah satunya dipicu oleh peningkatan komoditas administered price sesuai kebijakan pemerintah seperti peningkatan tarif PPN menjadi sebesar 11%, penyesuaian bertahap harga BBM seperti Pertamina dan Peralite, peningkatan harga LPG subsidi 3kg dan LPG non-subsidi ukuran 5kg dan 12kg, peningkatan cukai rokok sebesar 12% (yoy), serta potensi peningkatan harga komoditas lainnya yang diatur Pemerintah. Selain itu pada tahun 2022, tekanan komoditas volatile food juga diperkirakan meningkat selaras dengan perkiraan peningkatan harga ikan segar selaras dengan penurunan produksi akibat pembatasan aktivitas kapal bertonase >30GT di WPP 714 yang sebelumnya menjadi daerah tangkap utama nelayan Sultra. Disatu sisi, sinergi yang erat antara TPID Sultra dengan berbagai pihak dalam menjaga kelancaran distribusi diperkirakan menjadi faktor terjaganya tekanan inflasi kedepan. Selain itu, perubahan pola konsumsi masyarakat Sultra yang mulai meningkatkan konsumsi alternatif protein selain ikan seperti ayam dan telur juga diperkirakan menjadi faktor penahan tekanan inflasi ikan segar.

5. Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

REKOMENDASI KEBIJAKAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA UNTUK PENGENDALIAN INFLASI DI DAERAH

Sejalan dengan berbagai program pemerintah dalam mendorong produktivitas padi melalui ekstensifikasi dan intensifikasi yang terus berlanjut diperkirakan menjadi faktor penahan inflasi bahan pangan. Selain itu, beroperasinya Bendungan Ladongi dan perbaikan

jaringan irigasi tersier juga menjadi faktor pendorong perbaikan produksi padi kedepan. Lebih lanjut, TPID Sultra terus berupaya untuk memperkuat implementasi 4K dan mendorong perluasan kerjasama antar daerah baik dari sisi komoditas maupun mitra perdagangan sebagai bentuk pengendalian inflasi berkelanjutan, serta terus mendorong digitalisasi informasi harga pangan pada berbagai pasar di Sultra sebagai upaya mewujudkan keterbukaan harga antar daerah sehingga dapat mereduksi ketimpangan harga.